

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Sekretariat Kementerian

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PROGRAM GENERIK : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN 2. Persentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya. 4. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu. 5. Persentase pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN di media nasional. 6. Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN 7. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan 8. Tersusunnya kebijakan/ pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara; 			KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			9. Terlaksananya kampanyenya budaya kerja kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara. 10. Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi <i>Pilot Project</i> Pengembangan Budaya Kerja 11. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN 12. Persentase pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i> 13. Persentase Pengaduan Masyarakat terkait tugas dan fungsi internal yang ditindaklanjuti 14. Persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi 15. Persentase pejabat yang menandatangani pakta integritas/penetapan kinerja 16. Persentase temuan yang ditindaklanjuti 17. Persentase Penerapan manajemen SDM internal yang berkualitas			
1.1.	Pembinaan dan Pengelolaan Pelayanan perkantoran, keuangan Dan kepegawaian	Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan perkantoran, keuangan dan kepegawaian	1. Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase penyelesaian pengembangan sistem administrasi perkantoran yang dilakukan 3. Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100% 100% 100%	100% 100% 100%	BIRO UMUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4. Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu 5. Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara 6. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya 7. Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN 8. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN 9. Persentase penataan organisasi internal 10. Persentase Penerapan manajemen SDM internal yang berkualitas	100% 85% 100% 100% 50%	100% 100% 100% 100%	
1.2	Pembinaan dan Pengelolaan perencanaan, penganggaran, kerjasama lembaga dan pelaporan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan internal perencanaan/ penganggaran, kerjasama, pengembangan sistem dan penyusunan laporan kebijakan PAN dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	1. Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase dokumen evaluasi yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase dokumen kebijakan yang diselesaikan tepat waktu 4. Jumlah daerah yang disosialisasikan kebijakan PAN 5. Jumlah kegiatan/rapat koordinasi yang dilaksanakan 6. Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan	100% 100% 100% 6 Pemda 15 kali 100%	100% 100% 100% 7 Pemda 20 kali 100%	BIRO PERENCANAAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			7. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai Renstra 8. Persentase pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i> 9. Persentase SOP utama yang telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang sederhana	100% 10% (2011) 100%	100% 75% 100%	
1.3.	Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pencitraan lembaga	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan pencitraan lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	1. Persentase dokumen kehumasan yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah dialog kebijakan PAN yang dilaksanakan 3. Persentase publikasi/ pemberitaan tentang kebijakan PAN yang dilaksanakan 4. Persentase dokumentasi kebijakan PAN dikumpulkan 5. Persentase dokumen perpustakaan yang dikumpulkan	100% 10 kali 100% 100% 100%	100% 10 kali 100% 100% 100%	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
1.4.	Pembinaan dan Pengawasan intern dan <i>quality assurance</i>	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan intern pelaksanaan tugas Kementerian	1. Persentase dokumen pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah pemeriksaan dan evaluasi yang dilaksanakan 3. Jumlah program yang dimonitor 4. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan 5. Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan dan penganggaran sesuai aturan 6. Persentase Pengaduan Masyarakat terkait tugas dan fungsi internal yang ditindaklanjuti	100% 10 kali 1 program (7 Unit) 100 % 100% 100%	100% 10 kali 1 program (7 Unit) 100 % 100% 100%	INSPEKTORAT KEMENTERIAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			7. Persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi 8. Persentase pejabat yang menandatangani pakta integritas/penetapan kinerja 9. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100% 100% 100%	100% 100% 100%	
1.5.	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	Terwujudnya Perumusan kebijakan bidang PAN dan RB	1. Tersusunnya kebijakan/ pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara; 2. Terlaksananya kampanyenya budaya kerja kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara. 3. Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi <i>Pilot Project</i> Pengembangan Budaya Kerja 4. Tersusunnya kebijakan yang mendukung perumusan kebijakan	2011 : 1 Perpres 10% 2014 : 100% 2 IP 100%	- - 10 IP 100%	
2.	PROGRAM GENERIK : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PAN DAN RB	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik			KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2.1.	Pembinaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	1. Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik 2. Persentase sarana dan prasarana yang diadakan	85% 100%	100% 100%	BIRO UMUM

Deputi Bidang Kelembagaan (I)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PROGRAM TEKNIS: PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2) Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN 3) Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4) Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 5) Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 6) Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 7) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 8) Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya 9) Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya	24 peraturan/kebijakan (kumulatif s.d 2013) 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	8 peraturan/kebijakan - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KEGIATAN PRIORITAS					
1.1.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Terwujudnya kelembagaan Polhukam yang proporsional, efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2) Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3) Persentase LPNK bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4) Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	2 peraturan/kebijakan 20% 20% 20%	2 peraturan/kebijakan 100% 100% 100%	ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
1.2.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Terwujudnya kelembagaan perekonomian yang proporsional, efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2) Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3) Persentase LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4) Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	2 peraturan/kebijakan 20% 20% 20%	2 peraturan/kebijakan 100% 100% 100%	ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN I
1.3.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Terwujudnya kelembagaan perekonomian yang proporsional, efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2) Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3) Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	2 peraturan/kebijakan 20% 20%	2 peraturan/kebijakan 100% 100%	ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra	Terwujudnya kelembagaan kesra yang proporsional, efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2) Persentase Kementerian Negara bidang Kesra telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3) Persentase LPNK bidang Kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4) Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya	2 peraturan/kebijakan 20% 20% 20%	2 peraturan/kebijakan 100% 100% 100%	ASISTEN DEPUTI KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.5.	Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Kelembagaan	Meningkatnya hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan bidang Kelembagaan	1) Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN 2) Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya 3) Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	100% (diselesaikan) 20% 20%	- 100% 100%	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI KELEMBAGAAN

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (II)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM TEKNIS: PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja,akuntabel dan sejahtera	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang SDM Aparatur 2) Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan 3) Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS 4) Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 5) Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system 6) Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi 7) Persentase peningkatan penghasilan PNS	35 PP/2 Perpres/8 lainnya (kumulatif s.d 2013) 40% 20% 5% 45% 100% (selesai 2011) 5%	1 UU 100% 70% 45% 90% - 10%	DEPUTI BIDANG SDM APARATUR
	KEGIATAN PRIORITAS					
1.1.	Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	Terwujudnya perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi	1) Jumlah Dokumen penetapan formasi dan laporan hasil evaluasi formasi setiap tahun 2) Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar	2 laporan 40%	2 laporan 100%	ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN SDM APARATUR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3) Persentase formasi PNS yang ditetapkan 4) Jumlah kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS 5) Jumlah kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi) 6) Jumlah kebijakan (Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai/Formasi) 7) Jumlah kebijakan (Pedoman sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS) 8) Persentase tingkat penyusunan dan desiminasi pedoman perencanaan SDM	100% 1 PP 1 PP 1 Kebijakan (2011) 1 Kebijakan (2011) 25%	100% Sosialisasi Sosialisasi 1 kebijakan 1 kebijakan 100%	
1.2.	Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur	Terwujudnya pengembangan karir SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	1) Jumlah kebijakan (Rperpres) tentang Penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 2) Jumlah kebijakan (PP) tentang Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) 3) Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4) Jumlah kebijakan (PP) tentang Diklat Jabatan PNS 5) Jumlah (UU) kebijakan tentang manajemen kepegawaian (SDM Aparatur Negara)	1 Perpres 1PP 5% (2011) 50% 2011: 100%/1 PP) 25% 2014: 100%/1 UU	Sosialisasi Sosialisasi 45% Sosialisasi Sosialisas	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SDM APARATUR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			6) Tersusunnya kebijakan (Rperpres) tentang Pola Dasar Karir PNS 7) Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	1 Perpres 75% 2011: 100%/1 PP	Sosialisasi Sosialisasi	
1.3	Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas SDM Aparatur	Terwujudnya Penegakan Integritas SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	1) Jumlah kebijakan (PP) tentang Disiplin PNS 2) Jumlah kebijakan (PP) tentang Netralitas PNS (Larangan PNS menjadi anggota Parpol) 3) Jumlah kebijakan (PP) tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS 4) Jumlah kebijakan (PP) tentang Pembatasan PNS pada Usaha Swasta 5) Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS 6) Jumlah kebijakan (PP) tentang Pembatasan PNS pada Usaha Swasta 7) Jumlah kebijakan (PP) tentang Pemberian Cuti PNS	1 PP 75% 2011: 100%/1 PP 75% 2011: 100%/1 PP 1 PP 20% 75% 2011: 100%/1 PP 75% 2011: 100%/1 PP	Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi 70% 75% 2011: 100%/1 PP 75% 2011: 100%/1 PP	ASISTEN DEPUTI PENEGAKAN INTEGRITAS SDM APARATUR
1.4.	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur	Terwujudnya Kesejahteraan SDM Aparatur yang fair dan akuntabel	1) Jumlah Kebijakan (PP) Gaji/Tunjangan PNS/Polri 2) Persentase peningkatan penghasilan PNS 3) Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS 4) Persentase tingkat penyusunan Standarisasi Peringkat Jabatan bagi PNS	5 PP 5% 75% 2011: 100%/1 PP 50% 2011: 100%	5 PP 10% Sosialisasi Sosialisasi	ASISTEN DEPUTI KESEJAHTERAAN SDM APARATUR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			5) Laporan evaluasi Pembobotan Jabatan 6) Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan <i>merit system</i> 7) Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri 8) Jumlah Kebijakan (PP) tentang sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS	1 laporan 45% 1 PP 75% 2011: 100%/1 PP	1 laporan 90% Sosialisasi Sosialisasi	
1.5	Pengembangan Sistem Dukungan Data dan Informasi SDM Aparatur	Meningkatnya hasil perencanaan, evaluasi dan pengelolaan data SDM Aparatur	1) Persentase tingkat Pendataan tenaga honorer (Pendataan Ulang Non PNS) 2) Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi 3) Persentase instansi yang melakukan implementasi Sistem Database SDM Aparatur 4) Jumlah Kebijakan (PP) tentang Pegawai Tidak Tetap 5) Persentase tingkat Koordinasi Kebijakan Manajemen SDM Aparatur 6) Persentase tingkat perbaikan SOP Kedeputian SDM Aparatur 7) Persentase tingkat aplikasi data formasi secara nasional	80% 2011: 100% 90% 20% 75% 2011: 100%/1 PP 25% 75% 2011: 100% 50%	Sosialisasi - 100% Sosialisasi 100% - 100%	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI SDM APARATUR

Deputi Bidang Tata Laksana (III)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM TEKNIS: PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana 2) Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan 3) Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 4) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional 5) Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya) 6) Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 7) Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah 8) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	5 UU/6 PP/ 4 lainnya (kumulatif s.d 2013) 20% 17 K/L (pertahun) 70% 100% 100% K/L 30% Pemda 100% K/L 10% Pemda 4 laporan triwulanan	12 PP 100% 15 K/L 100% 100% 100% Pemda 100% Pemda 4 laporan triwulanan	DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA
	KEGIATAN PRIORITAS					
1.1	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Administrasi Umum	Terwujudnya Tata Laksana administrasi umum yang modern, efisien, efektif berbasis teknologi informasi	1) Jumlah pedoman/modul di bidang Tata Laksana (Tata Naskah Dinas) 2) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan pedoman tata naskah dinas	1 pedoman/modul 20%	1 pedoman/modul 100%	ASISTEN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP 4) Jumlah pedoman/modul di bidang Tata Laksana (Kehumasan) 5) Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi 6) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan pedoman kehumasan	20% 1 pedoman/modul 20% 20%	100% 1 pedoman/modul 100% 100%	
1.2.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Polhukam dan Kesra	Terwujudnya Tata Laksana Polhukam dan Kesra yang efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah) 2) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat)	1 UU (2013) / 3 PP (2014) 1 UU (2013) / 3 PP (2014)	- -	ASISTEN DEPUTI TATALAKSANA POLITIK HUKUM, KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.3.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Perekonomian	Terwujudnya Tata Laksana Perekonomian yang efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (RUU tentang Administrasi Pemerintah) 2) Jumlah manual praktis (modul) Implementasi peraturan/kebijakan 3) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (PP Tata Laksana Perizinan) 4) Jumlah manual praktis (modul) Implementasi peraturan/kebijakan	1 UU (2010) / 2 PP (2011) - 1 PP (2011) 4 modul (2011)	- 3 Modul - -	ASISTEN DEPUTI TATALAKSANA PEREKONOMIAN
1.4.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Korporatisasi	Terwujudnya Tata Laksana Korporatisasi yang efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (RUU tentang Etika Penyelenggara Negara)	1 UU (2011)/3 PP (2012)	- -	ASISTEN DEPUTI TATALAKSANA KORPORATISASI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana (RUU tentang Badan Layanan Umum (BLU))	1 UU (2013)/ 3 PP (2014) (2014)		
1.5.	Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Tata Laksana	Meningkatnya hasil perencanaan dan evaluasi program/kegiatan bidang Tata Laksana	1) Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi 2) Jumlah dokumen pelaporan 3) Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan 4) Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan yang disusun	10 dokumen 15 dokumen 20% 8 dokumen	15 dokumen 20 dokumen 100% 8 dokumen	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI TATA LAKSANA
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif	1) Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 2) Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional 3) Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya) 4) Jumlah instansi yang menerima sosialisasi 5) Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah 6) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	17 K/L (pertahun) 70% 100% 100% K/L 30% Pemda 100% K/L 10% Pemda 4 laporan triwulanan	15 K/L 100% 100% 100% Pemda 100% Pemda 4 laporan triwulanan	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI TATA LAKSANA

Deputi Bidang Akuntabilitas (IV)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM TEKNIS: PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya instansi pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja 2) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 3) Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik 4) Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 5) Persentase LAKIP yang diterima 6) Persentase PK yang diterima 7) Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	1 UU (2011) /24 lainnya (kumulatif s.d 2013) 45% 40% 20% 87% 45% 30%	6 lainnya 80% 55% 36% 99% 70% 45%	DEPUTI AKUNTABILITAS APARATUR
	KEGIATAN PRIORITAS					
1.1.	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya hasil pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja 2) Jumlah pedoman/modul di bidang akuntabilitas kinerja 3) Jumlah hasil kajian di bidang akuntabilitas kinerja	3 peraturan/kebijakan 2 Pedoman/modul 1 kajian	3 peraturan/kebijakan 2 Pedoman/modul 1 kajian	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
1.2.	Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan LKjPP	Meningkatnya pemanfaatan data kinerja	1) Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) 2) Database pemetaan penerapan Sistem AKIP 3) Persentase instansi yang menggunakan TI untuk pengelolaan data kinerja	1 laporan 1 database 0%	1 laporan 1 database 25%	ASISTEN DEPUTI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.	Pembinaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja oleh instansi	1) Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja 2) Persentase instansi yang diberi sosialisasi, bimtek, pelatihan/pendampingan 3) Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 4) Persentase LAKIP yang diterima 5) Persentase PK yang diterima 6) Hasil survey pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja 7) Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	45% 15% 20% 87% 45% - 30%	80% 28% 36% 99% 70% 1 dokumen 45%	ASISTEN DEPUTI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR WILAYAH BARAT
1.4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1) Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik 2) Jumlah laporan hasil evaluasi	40% 100 laporan	55% 130 laporan	ASISTEN DEPUTI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR WILAYAH TIMUR
	KEGIATAN PENUNJANG (LAINNYA)					
1.5.	Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya hasil perencanaan dan evaluasi program/kegiatan bidang akuntabilitas kinerja aparatur	1) Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan yang disusun 2) Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi 3) Jumlah dokumen pelaporan	5 dokumen 24 dokumen 27 dokumen	5 dokumen 24 dokumen 27 dokumen	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR

Deputi Bidang Pelayanan Publik (V)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM TEKNIS: PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	1) Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Pelayanan Publik 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat 3) Skor IKM unit pelayanan 4) Jumlah unit pelayanan yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 5) Jumlah Pemda yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 6) Persentase unit pelayanan/ Pemerintah Daerah yang berkategori terbaik 7) Persentase unit pelayanan/ Pemerintrah Daerah yang berkategori baik 8) Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS 9) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. 10) Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat	5 PP/ 1 Perpres/1 Inpres/12 lainnya (kumulatif s.d 2013) 33 Kabupaten/Kota 60 150 unit 100 Kab/Kota (2011) 50% 50% 70% 10 Kab/kota 30 unit	3 lainnya 33 Kabupaten/Kota 85 350 unit 120 Kab/Kota (2013) 90% 90% 95% 40 Kab/Kota 120 unit	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KEGIATAN PRIORITAS					
1.1.	Pengembangan sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya perbaikan sistem pelayanan dan penerapan standar pelayanan publik	1) Jumlah pedoman 2) Jumlah unit pelayanan model uji coba	1 pedoman 12 unit	2 pedoman 48 unit	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN DAN STANDARISASI PELAYANAN
1.2.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang Perekonomian	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang ekonomi dan bisnis	1) Jumlah <i>help-desk</i> pada Provinsi 2) Jumlah kasus yang diselesaikan	6 Provinsi 6 kasus	33 Provinsi 24 kasus	ASISTEN DEPUTI PELAYANAN PEREKONOMIAN
1.3.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial	1) Tersusunnya instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 2) Laporan hasil pelaksanaan penilaian pelayanan 3) Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat 4) Skor IKM unit pelayanan 5) Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu) 6) Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dampak Pemberian Penghargaan Citra Bahkti Abdi Negara (CBAN)	1 kebijakan 1 Laporan (2011) 33 Kabupaten/Kota 60 70% 26 Kabupaten/Kota	- 1 laporan 33 Kabupaten/Kota 85 95% 26 Kabupaten/Kota	ASISTEN DEPUTI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang Pemerintahan Umum, Hukum, dan Keamanan	1) Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. 2) Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat 3) Jumlah unit pelayanan yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 4) Jumlah Pemda yang dinilai Berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 5) Persentase unit pelayanan yang berkategori terbaik sesuai penilaian 6) Persentase unit pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian	10 Kab/kota 30 unit 150 unit 100 Kab/Kota (2011) 50% 50%	40 Kab/Kota 120 unit 350 unit 120 Kab/Kota (2013) 90% 90%	ASISTEN DEPUTI PELAYANAN PEMERINTAHAN UMUM, HUKUM DAN KEAMANAN
1.5.	Koordinasi perencanaan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	Meningkatnya dukungan program peningkatan kualitas pelayanan publik	1) Jumlah RPP/R Prepres 2) Jumlah inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 3) Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi 4) Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi	5 PP/ 1 Perpres 1 Inpres (2011) 35% 35%	- - 100% 100%	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Deputi Bidang Pengawasan (VI)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM TEKNIS: PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan 2) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan 3) Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun 4) Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah 5) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	1 UU/1 Perpres/28 lainnya (kumulatif s.d 2013) 40% 60% 60% 60%	7 lainnya 90% 90% 90% 90%	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
	KEGIATAN PRIORITAS					
1.1	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Intern Pemerintah	Meningkatnya Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan) 2) Jumlah peraturan/kebijakan (Perpres Pakta Integritas) 3) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (perencanaan pengawasan fungsional) 4) Persentase instansi yang disosialisasikan KESA dan Kendali Mutu	1 draft RUU (2013 : UU) 1 Perpres Pakta Integritas (2011) 1 kebijakan 60%	1 UU - 2 kebijakan 90%	ASISTEN DEPUTI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			5) Persentase APIP yang melaporkan hasil pengawasan 6) Persentase instansi yang memahami SPIP 7) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	60% 40% 40%	90% 90% 90%	
1.2.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi TLHP Fungsional	Meningkatnya TLHP Fungsional yang efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (Pemantauan TLHP Fungsional) 2) Persentase pelaksanaan pemantauan TLHP 3) Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun	1 kebijakan 60% 60%	2 kebijakan 90% 90%	ASISTEN DEPUTI PEMANTAUAN TLHP FUNGSIONAL
1.3.	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat	Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat 2) Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	1 kebijakan 60%	2 kebijakan 90%	ASISTEN DEPUTI PENGAWASAN MASYARAKAT
1.4.	Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya kinerja percepatan pemberantasan korupsi	1) Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan 2) Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi) 3) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	4 kebijakan 1 Inpres 60%	4 kebijakan 90%	ASISTEN DEPUTI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KEGIATAN PENUNJANG (LAINNYA)					
1.5.	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Pengawasan	Meningkatnya hasil perencanaan dan evaluasi program/kegiatan bidang pengawasan	Jumlah dokumen program dan evaluasi bidang Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	ASISTEN DEPUTI PROGRAM DAN EVALUASI PENGAWASAN